

Lampiran : Peraturan Bupati Gresik
 Nomor :
 Tanggal : Desember 2016

I. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah.	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	Komposit nilai terhadap indikator kepedulian HAM sesuai dengan Regulasi Kementerian Hukum dan HAM	Indeks peduli HAM Kemenkumham	Kantor Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik;	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat per unit layanan ≤50 = Kurang 51-69 = Cukup 70-85 = Baik 86-100 = Sangat Baik	Hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah, Dispendukcapil, Diskominfo, Kecamatan
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif	Indeks Reformasi Birokrasi	Komposit nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan area Kelambagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaa, Regulasi Deregulasi Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, BAPPEDA
		Nilai Opini BPK	Pernyataan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Hasil Nilai Opini BPK	Inspektorat, BPPKAD
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto secara year on year	Report base BPS	BPPKAD, Dinas PM dan PTSP, Diskoperindag, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian
5	Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rata-rata indeks pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan tutupan hutan	Report base BPS	DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perkim

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6	Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Report base data tingkat pengangguran terbuka	Dinas Tenaga Kerja, Diskoperindag
7	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu.	Persentase Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Report base data tingkat kemiskinan	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas PMD
8	Meingkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Komposit dari nilai angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita	Report base BPS	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD
9	Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita	Report base BPS	Dinas KB, PP dan Perlindungan Anak

II. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100\%$	Indeks peduli HAM Kemenkumham	Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor Kesbangpol
2	Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran	Persentase Desa Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Report base Jumlah Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan pratotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian	Persentase pemuda pelopor berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda pelopor/berprestasi}}{\text{Jumlah pemuda yang difasilitasi}} \times 100\%$	Report base data Pemuda pelopor/berprestasi	Dinas Pemuda Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global	Persentase Kelestarian Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya}} \times 100\%$	Report base data cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatn pelayan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi	Persentase kepemilikan e-KTP	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan e-KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$	Report base data kepemilikan e-KTP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi	Persentase Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah	Pertumbuhan jumlah pengunjung website resmi Pemerintah Daerah tahun ke- n	Report base data Publishing Informasi Official Website Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	$\frac{\text{Jumlah Data Report Based secara online}}{\text{Jumlah Data Report Based}} \times 100\%$	Data Report Base SKPD yang bisa diakses dari Website resmi Pemerintah Daerah	
8	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Persentase kecamatan dengan nilai IKM sangat baik	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan dengan nilai IKM sangat baik}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$	Hasil survey IKM	Kecamatan
7	Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah	Nilai Pangripta	Pengukuran terhadap kualitas dokumen perencanaan (keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran) baik dokumen jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di tingkat nasional	Bappenas	BAPPEDA
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$	Hasil audit internal dan eksternal	Inspektorat
9	Meningkatnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good and clean governance	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil pengukuran indeks komposit variabel : kinerja, kesesuaian syarat jabatan, kompensasi, disiplin	Survey base indeks Profesionalitas ASN	BKD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
12	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif	Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	$\frac{\text{Jumlah Perda Inisiatif Tahun } n-n_0}{\text{Jumlah Perda Inisiatif Tahun dasar}(n_0)} \times 100\%$	Report base perda inisiatif	Sekretariat DPRD
13	Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase standarisasi pelayanan publik	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi}}{\text{Jumlah PD Pelayanan publik}} \times 100\%$	Report base data Pelayanan Publik yang sudah berstandarisasi	Selretariat Daerah
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	Capaian nilai evaluasi SAKIP (minimal B)		
14	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik	Persentase Capaian Alih Media Arsip	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan alih media}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Data arsip elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Angka Pertumbuhan Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN) pada tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Report base realisasi investasi	Dinas PM dan PTSP
14	Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	Pertumbuhan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun ke-n dibanding tahun dasar	Report base PAD	BPPKAD
15	Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata Gresik tahun ke n dibanding tahun dasar (2015)	Report base jumlah kunjungan wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Report base data BPS	Dinas Pertanian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
17	Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi	Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Perikanan}}{\text{PDRB Total}} \times 100\%$	Report base data BPS	Dinas Perikanan
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Air Sungai	Nilai komposit kualitas air	Report base kementerian LH	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Nilai komposit kualitas udara	Report base kementerian LH	Dinas Lingkungan Hidup
19	Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Report base jalan kabupaten kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	$\frac{\text{Jumlah saluran pengendalian banjir dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah saluran pengendalian banjir}} \times 100\%$	Report base jembatan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$	Report base jaringan irigasi kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase Akses Air Bersih/Minum	$\frac{\text{Jumlah RT pemanfaat Air Bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Report base RT pemanfaat Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah pemanfaatan Tata Ruang}} \times 100\%$	Hasil Monev pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
20	Menguatkan konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio ketersediaan angkutan angkutan jalan dan kemantapan jalan dibanding per 100.000 penduduk	Report base angkutan jalan	Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
21	Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengajuan sengketa Tanah}} \times 100\%$	Berita Acara penyelesaian konflik pertanahan	Dinas Pertanahan
22	Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Usia Kerja}} \times 100\%$	Report base BPS	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial}}{\text{Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial}} \times 100\%$	Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
23	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	Pertumbuhan Jumlah nilai ekspor komoditi (dalam \$) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Report base nilai ekspor	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		Angka Pertumbuhan Kumulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Report base Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
24	Menguatkan daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif	Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil	Angka pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil per tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Report base Usaha Mikro dan Kecil	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	Angka pertumbuhan Koperasi sehat per tahun ke-n dibanding tahun dasar (2015)	Report base Koperasi sehat	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
25	Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 1000$	Report base PMKS yang ditangani	Dinas Sosial
26	Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	Luas penurunan kawasan permukiman kumuh tahun ke-n	Report base Luas kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	Report base Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
27	Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang professional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.	Indeks Pembangunan Desa	Survey based Kementerian Desa Dengan klasifikasi desa berindeks "tertinggal" (desa dengan indeks < 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks >50 dan <75), dan "mandiri" (desa dengan indeks >75)	Survey base kementerian Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 4-6 Tahun $\frac{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$	Report base BPS	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A $\frac{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Report base BPS	Dinas Pendidikan
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B $\frac{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Report base BPS	Dinas Pendidikan
		Angka Rata rata lama sekolah	Rata-rata lama masa pendidikan dibagi penduduk usia lebih dari 15 tahun	Report base BPS	Dinas Pendidikan
29	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	Jumlah Kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran $\frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}}{\text{Jumlah kelahiran}} \times 1000$	Report base BPS	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun $\frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran}} \times 1000$	Report base BPS	Dinas Kesehatan
		Angka Usia Harapan Hidup	Berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite	Report base BPS	Dinas Kesehatan
		Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di RSUD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	RSUD Ibnu Sina
30	Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca	Indeks Minat Baca Daerah	Rasio Pemustaka Daerah dibandingkan dengan Jumlah penduduk	Report base data pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
31	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih \times 1000 Jumlah Aduan	Report base jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi Teknisi, Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Report base BPS	
32	Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, penambahan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	Angka laju pertumbuhan penduduk	$r = \{(Pt / P0)(1/t) - 1\} \times 100$	Report base BPS	
		Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	Jumlah peserta KB Aktif \times 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	Report base BPS	

III. Indikator Kinerja Utama SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

1. Sekretariat Daerah

Tugas Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
1	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum	Kualitas penyusunan LPPD	Hasil evaluasi penyusunan LPPD oleh Kemendagri	Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Bag. Otonomi dan Kerjasama		
		Persentase produk hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	X	100%	Report based Data Produk Hukum yang ditetapkan	Bag. Hukum
			Jumlah produk hukum yang diusulkan				
Persentase RTM penerima bansos	Jumlah RTM penerima bansos	X	100%	Report based data penerima bansos	Bag. Kesra		
	Jumlah RTM						
2	Terwujudnya pelayanan administrasi bidang Pembangunan, Perekonomian dan SDA, Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase peningkatan PAD sektor BUMD	Jumlah PAD sektor BUMD tahun (n) - tahun (n-1)	X	100%	Report based penerimaan PAD	Bag. Perekonomian
			Jumlah PAD sektor BUMD tahun (n)				
		Persentase jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD	Jumlah SKPD yang memenuhi target kinerja APBD	X	100%	Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD	Bag. Program Pembangunan
			Jumlah SKPD				
Persentase proses pengadaan secara elektronik	Jumlah proses pengadaan secara elektronik	X	100%	LPSE Kab. Gresik	Bag. Pelayanan Pengadaan		
	Jumlah pengadaan						
3	Terwujudnya Pelayanan administrasi Pengelolaan Keuangan, Organisasi Ketatalaksanaan, dan Kehumasan	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP B	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP B	X	100%	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kab. Gresik	Bag. Ortala
			Jumlah SKPD				
		Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM sangat baik	Jumlah unit pelayanan dengan nilai SKM sangat baik	X	100%	Report based hasil SKM	Bag. Ortala
			Jumlah unit pelayanan				
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	X	100%	Report based data pengaduan masyarakat	Bag. Humas dan Protokol
Jumlah pengaduan							

2. Sekretariat DPRD

Tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan DPRD;
 - Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Persentase Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah	$\frac{\text{Perda Inisiatif yang telah disahkan}}{\text{Perda Inisiatif yang diusulkan}} \times 100\%$	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Bagian Risalah dan Persidangan
		Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (DPRD) sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan IKM	Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol

3. Inspektorat

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

- Fungsi
- Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
 - Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
 - Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
 - Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan aduan masyarakat	Persentase tidak lanjut hasil audit internal	$\frac{\text{jumlah temuan audit internal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan audit internal}} \times 100\%$	LHP dan Dokumen Tindak Lnjut	Semua Irban
		Persentase tidak lanjut hasil audit eksternal	$\frac{\text{jumlah temuan audit eksternal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan audit eksternal}} \times 100\%$	LHP dan Dokumen Tindak Lnjut	
		Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	$\frac{\text{pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah aduan}} \times 100\%$	LHP dan Register pengaduan	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP SKPD	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil evaluasi SAKIP SKPD}} \times 100\%$	LHE dan Dokumen Tindak Lanjut	Semua Irban
3	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah di SKPD melalui pelaksanaan SPIP	Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP}}{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP}} \times 100\%$	LHE	Semua Irban
4	Tersedianya APIP yang profesional	Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan	$\frac{\text{Jumlah APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan}}{\text{Jumlah APIP}} \times 100\%$	Dokumen Sertifikat Diklat/Pelatihan	Semua Irban dan Sekretaris

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan

Tugas Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah.

- Fungsi
- Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistik daerah;
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
 - Pengkoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
1	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Jumlah dokumen Renja kualitas Baik	X 100%	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	1. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 2. Bidang perekonomian 3. Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup	
			Jumlah PD				
		Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pembangunan RKPD yang selaras dengan RPJMD	X 100%			RPJMD, RKPD
			Jumlah program RPJMD				
2	Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	Jumlah usulan musrenbang dalam RKPD	X 100%	RKPD, BA, Musrenbang, e-Renbang	Sekretariat	
			Jumlah usulan musrenbang				
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD	Jumlah sasaran dengan capaian minimal 76%	X 100%	RPJMD, RKPD, LKPJ	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengolahan Data	
			Jumlah sasaran RPJMD				
		Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah	Jumlah program dengan capaian sesuai target	X 100%	Laporan Realisasi Kinerja	Sekretariat	
			Jumlah program yang dilaksanakan				
3	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berlandaskan inovasi melalui penguatan penelitian dan pengembangan	Persentase pertumbuhan capaian inovasi daerah	Capaian inovasi daerah th n - th (n-1)	X 100%	Sistem Inovasi Pelayanan Publik LKPJ	Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengolahan Data	
			Capaian inovasi daerah th (n-1)				

5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Membantu Bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan

- Fungsi
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah	$\frac{PDn - PDn-1}{PDn-1} \times 100\%$	Laporan Keuangan	Bidang Pelayanan, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang PBB dan BPHTB	
		Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{PADn - PADn-1}{PADn-1} \times 100\%$	Laporan Keuangan		
		Persentase Kenaikan Pendapatan dari Pajak Daerah	$\frac{PPDn - PPDn-1}{PPDn-1} \times 100\%$	Laporan Keuangan		
		Keterangan :				
		PD = Pendapatan Daerah				
		PAD = Pendapatan Asli Daerah				
		PPD = Pendapatan dari Pajak Daerah				
n = Tahun ke-n						
2	Meningkatnya Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI	Perolehan Opini Laporan Keuangan	Nilai Opini Laporan Keuangan	Hasil Pemeriksaan BPK RI	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset	
		Keterangan :				
		Disclamer = 20 %				
		Tidak Wajar = 40 %				
		Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 80 %				
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 100 %						

6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil Negara.

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - Pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
 - Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya	Persentase ASN yang mengikuti diklat Teknis/Fungsional lebih dari 80 JP/Tahun	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis/fungsional lebih dari 80 JP/Tahun}}{\text{Jumlah pejabat fungsional di Link. Pemkab Gresik}} \times 100\%$	Data dari Diklat Teknis/Fungsional	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase pejabat struktural yang telah memiliki sertifikasi Diklat PIM sesuai dengan jenjangnya	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang telah memiliki sertifikat Diklat PIM sesuai jenjangnya}}{\text{Jumlah pejabat struktural di Link. Pemkab Gresik}} \times 100\%$	Data dari Diklat Penjurangan Struktural	
2	Terwujudnya penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan keahliannya	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan	$\frac{\text{Jumlah penempatan ASN yang sesuai dengan analisa jabatan}}{\text{Jumlah ASN di Link. Pemkab Gresik}} \times 100\%$	Dokumen Evaluasi Jabatan dan Dokumen Analisa Jabatan	Bidang Mutasi dan Kepangkatan
3	Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun n	Dokumen IKM	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan
		Persentase akurasi database kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah data ASN sesuai Juknis yang dilaporkan}}{\text{Jumlah ASN di Kab. Gresik}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional akurasi database kepegawaian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai juknis (berkas lengkap) Dilaporkan tepat waktu 	SIMPEG dan DMS (Document Manajemen System)	

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas Melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Fungsi
- Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah;
 - Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah;
 - Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana;
 - Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kebakaran	Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh}}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}} \times 100\%$	Report base data desa tangguh bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Air Bersih pada saat Tanggap Darurat Kekeringan	Persentase Distribusi Air Bersih di Wilayah Kekeringan	$\frac{\text{Jumlah Bantuan Air Bersih (ltr)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Air Bersih (ltr)}} \times 100\%$	Report base data desa kekeringan	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang Teridentifikasi dan Diverifikasi	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Teridentifikasi dan Diverifikasi}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	Report base data desa kejadian bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

8. Dinas Pendidikan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pendidikan.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang pendidikan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses pendidikan dasar	APM SD	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A X 100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan Dasar
		Angka Kelulusan SD	Jumlah lulusan SD/MI jumlah siswa SD/MI kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama X 100%	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
		APM SMP	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B X 100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
		Angka Kelulusan SMP	Jumlah lulusan SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs kelas tertinggi pada tahun ajaran yang sama X 100%	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Jumlah anak putus sekolah SD/MI jumlah siswa SD/MI X 100%	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs jumlah siswa SMP/MTs X 100%	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
2	Meningkatnya akses anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal	APM PAUD	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober Usia 3-6 Tahun X 100% Jumlah anak usia 3 – 6 Tahun	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Anak Usia Dini dan Non Formal
		APK PAUD	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kober X 100% Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
		Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	Jumlah lulusan Paket A, B, dan C X 100% Jumlah kelas tertinggi Paket A, B dan C	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi Kompetensi Tenaga Pendidik	$\frac{\text{Jumlah guru yang memenuhi kompetensi Tenaga Pendidik}}{\text{Jumlah guru}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Persentase guru yang berkualifikasi S1 dan D4	$\frac{\text{Jumlah guru yang berkualifikasi S1 dan D4}}{\text{Jumlah guru}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	
4	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan	Persentase rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar SD/MI tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis}}{\text{Jumlah keseluruhan rombongan belajar SD/MI}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan
		Persentase rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar SMP/MTs tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis}}{\text{Jumlah keseluruhan rombongan belajar SMP/MTs}} \times 100\%$	Profil pendidikan Dinas Pendidikan	

9. Dinas Kesehatan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kesehatan.

- Fungsi
- Pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan kesehatan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesehatan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	AKI	Jumlah kematian ibu pada tahap kehamilan dan kelahiran X 100.000 KH Jumlah Kelahiran Hidup	Laporan Puskesmas	Bidang Kesehatan Masyarakat
		AKB	Jumlah kasus kematian bayi pada usia 0-1 tahun X 1.000 KH Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun tertentu	Laporan Puskesmas	
		Presentasi balita gizi buruk	Jumlah balita dengan BB sangat kurang X 100% Jumlah balita yang ditimbang	Laporan Puskesmas	
2	Meningkatnya promosi dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	Jumlah Desa siaga aktif purnama mandiri X 100% Jumlah seluruh Desa	Laporan Puskesmas	
3	Meningkatnya kesehatan lingkungan	Persentase Desa/Kelurahan STBM	Jumlah Desa / Kelurahan Yang melaksanakan STBM X 100% Jumlah Desa / Kelurahan Yang ada	Laporan Puskesmas	
4	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI	Jumlah Desa / Kelurahan UCI X 100% Jumlah seluruh Desa / Kelurahan	Laporan Puskesmas	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten X 100% Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten	
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif X 100% Jumlah desa/kelurahan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	$\frac{\text{Jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap}}{\text{Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Case Fatality Rate DBD	$\frac{\text{Penderita DBD meninggal}}{\text{Semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani}} \times 100\%$	Laporan Puskesmas	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	$\left(\frac{\text{Puskesmas terakreditasi}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Klinik terakreditasi}}{\text{Jumlah Klinik}} \times 50\% \right)$	Puskesmas dan Klinik	Bidang Pelayanan Kesehatan
		Persentase RS terakreditasi	$\frac{\text{Rumah sakit yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Sakit}} \times 100\%$	Rumah sakit	
6	Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan	Rasio Dokter Spesialis Obgyn	$\left(\frac{\text{Jumlah Dokter Spesialis Obgyn}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Rasio Dokter Spesialis Anak	$\left(\frac{\text{Jumlah Dokter Spesialis Anak}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Rasio Dokter Umum	$\left(\frac{\text{Jumlah Dokter Umum}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Rasio bidan per 100.000 penduduk	$\left(\frac{\text{Jumlah Bidan}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Rasio perawat per 100.000 penduduk	$\left(\frac{\text{Jumlah Perawat}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Rasio apoteker per 100.000 penduduk	$\left(\frac{\text{Jumlah apoteker}}{100.000 \text{ jumlah penduduk}} \right)$	Kepegawaian Dinkes dan Organisasi Profesi	
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten gresik yang melaksanakan pelayanan}} \times 100\%$	Perijinan Dinas Kesehatan	
		Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin	$\frac{\text{Jumlah sarana kefarmasian sesuai standar dan berijin}}{\text{Jumlah sarana kefarmasian}} \times 100\%$	Diskoperindag	

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Data IKK (IbuKota Kecamatan) Jalan	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya penanggulangan banjir	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Pedesaan	$\frac{\text{Panjang saluran pembuangan milik desa kondisi baik}}{\text{Panjang saluran pengendalian banjir}} \times 100\%$	Hasil survey lapangan	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perkotaan	$\frac{\text{Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang saluran pengendalian banjir}} \times 100\%$	Data master plan drainase perkotaan	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$	Data RIPI (Rencana Induk Pengelolaan Irigasi)	Bidang Sumber Daya Air
4	Meningkatnya Penyediaan air bersih	Persentase pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Data RISPAM (Rencana Induk SPAM)	Bidang Cipta Karya

11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Luas penurunan kawasan permukiman kumuh	Jumlah penurunan kawasan permukiman kumuh	Studi RPKP	Bidang Kawasan Permukiman
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber- IMB per satuan bangunan Jumlah bangunan	Data survey lapangan	Bidang Rumah Swadaya
		Persentase Kawasan Perumahan yang dibangun PSU nya	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Perumahan yang dibangun PSU nya}}{\text{Jumlah Kawasan Perumahan}} \times 100\%$	Data based PSU	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase rumah layak huni untuk masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	$\frac{\text{Jumlah MBR yang memiliki rumah layak huni}}{\text{Jumlah MBR}} \times 100\%$	Data based rumah layak huni untuk MBR	Bidang Rumah Umum

12. Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.

- Fungsi
- Melakukan tindakan penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
 - Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
 - Melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya penegakan PERDA yang terkoordinasi dan konsisten	Persentase cakupan penegakan PERDA dan PERBUP di Kabupaten Gresik	Jumlah pelanggaran PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan X 100%	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Khusus	Bidang Penegakan Perundang-Undangan
			Jumlah pelanggaran PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah di tahun bersangkutan		
		Persentase jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana dengan cara yustisial	Jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana yang ditindaklanjuti dengan cara yustisial X 100%	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Khusus	
			Jumlah pelanggaran PERDA bersanksi pidana yang teridentifikasi		
2	Terwujudnya suatu keadaan dinamis sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib	Persentase cakupan pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat di Kabupaten Gresik X 100%	Dokumen kegiatan operasi penertiban	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
			Jumlah kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat di Kabupaten Gresik		
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman	Banyaknya kelompok patroli X 3 kali patroli dalam sehari Jumlah Kecamatan di Kabupaten Gresik	Jadwal kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas polisi pamong praja	Indeks kepuasan Masyarakat dalam penegakan PERDA	Berdasarkan Kepmenpan RI KEP/No. 25/M.PAN/TAHUN 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi	Dokumen IKM	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Rasio jumlah polisi pamong praja terhadap jumlah penduduk	Jumlah Polisi Pamong Praja X 10,000 jumlah penduduk	Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja	
4	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum	Rasio jumlah Satuan Linmas per RT	Jumlah satuan Linmas di Kabupaten Gresik	Data dari Desa di Kabupaten Gresik	
			Jumlah RT di Kabupaten Gresik		
		Persentase desa yang memiliki Perdes	Jumlah desa yang memiliki Perdes Trantibum X 100% Jumlah desa di Kabupaten Gresik	Data dari DPD di Kabupaten Gresik	

13. Dinas Sosial

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- Fungsi
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi teknis ke propinsi dan antar kabupaten/kota dalam rangka pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Rasio rehabilitasi terhadap jumlah PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 1000$	Report base PMKS yang ditangani	Bidang Rehabilitasi Sosial
			$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 1000$	Report base data PMKS di Kab. Gresik	
2	Meningkatnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Rasio perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin	$\frac{\text{Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan}}{\text{Jumlah fakir miskin}} \times 1000$	Report base data fakir miskin di Kab. Gresik	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Meningkatnya pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina}}{\text{Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada}} \times 100\%$	Report base data Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kab. Gresik	Bidang Pemberdayaan Sosial

14. Dinas Tenaga Kerja

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
 - Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Yang Memperoleh Penempatan Kerja Baik Di Dalam maupun Di Luar Negeri	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur usia (15-64)}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Data Penempatan Perluasan Kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 - 64)}} \times 100\%$	Data Penempatan Perluasan Kerja	
		Penempatan Para Pencari Kerja	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100\%$	Data Penempatan Perluasan Kerja	
2	Terwujudnya pencari kerja dan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Persentase tenaga kerja terlatih	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan}} \times 100\%$	Data Pendaftar Pelatihan	Bidang Pelatihan Kerja
3	Terwujudnya fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Persentase perusahaan yang memenuhi norma K3	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang memenuhi norma K3}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta data pengujian kualitas udara emisi dan ambien	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas
			Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan Norma Kerja}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase perusahaan yang memenuhi perlindungan norma sosial ketenagakerjaan	$\frac{\text{jumlah perusahaan yang memenuhi perlindungan norma sosial ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	Data pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, serta data pengujian kualitas udara emisi dan ambien	Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Berkurangnya Tingkat Kecelakaan Kerja.	Persentase perusahaan dengan kecelakaan kerja nihil	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang tidak mengalami kecelakaan kerja}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	Data Perusahaan terdaftar penerima Zero Accident Award	
5	Terselesainya gugatan kasus	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan secara tripartit oleh Disnakertrans dengan Persetujuan Bersama maupun yang diteruskan ke lembaga P4D dan P4P}}{\text{Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Disnakertrans}} \times 100\%$	Data perselisihan hubungan industrial	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6	Meningkatnya hubungan industrial	Persentase perusahaan yang memberlakukan Perjanjian Kerja Bersama	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah memberlakukan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama}}{\text{Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	Data Perusahaan pendaftar PP dan PKB	
7	Terlaksananya UMK di Kabupaten Gresik	Persentase perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit}}{\text{Jumlah perusahaan yang wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartit}} \times 100\%$	Data Perusahaan pendaftar PP dan PKB	

15. Dinas Lingkungan Hidup

- Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Kawasan Lindung	Rasio Kawasan Lindung	$\frac{\text{Luas kawasan yang dilindungi (ha)}}{\text{Luas seluruh wilayah (ha)}} \times 100\%$	Report based Data kawasan lindung	Bidang Tata Lingkungan Hidup	
2	Meningkatnya Kawasan Tangkapan Air	Capaian Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber - sumber air	$\frac{\text{Luas Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber-sumber air}}{\text{Luas wilayah Tangkapan air dan Sumber-sumber Air}} \times 100\%$	Report based Data konservasi daerah tangkapan air dan sumber air		
3	Meningkatnya luasan RTH di wilayah Kabupaten Gresik baik RTH Publik maupun RTH Privat	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas Ruang terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah ber HPL / HGB}} \times 100\%$	Report based Data Ruang Terbuka Hijau		Bidang Pertamanan dan Dekorasi
4	Meningkatnya efektivitas cakupan layanan pengelolaan persampahan	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah TPS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Report based Data Tempat Pembuangan Sampah	Bidang Pengelolaan Kebersihan	
5	Meningkatnya Ketaatan Badan Usaha Terhadap IKLH	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	$\frac{\text{Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran Air, Udara}}{\text{Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$	Report based usaha/kegiatan yang diawasi	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian aduan Kasus Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Aduan Kasus Lingkungan Hidup yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah aduan Kasus Lingkungan Hidup}} \times 100\%$	Report based kasus lingkungan hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	

16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan program di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB		
1	Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya	Cakupan kepemilikan KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yg memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100\%$	Data penerbitan KTP-el Database SIAK	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
			Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah anak (usia 0 s/d 17 th) yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 s/d 17 th dan belum menikah}} \times 100\%$		Data Penerbitan KIA Database SIAK	
		Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil		Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak usia 0 - 18 th		$\frac{\text{Jumlah anak (usia 0 s/d 18 th) yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak usia 0 s/d 18 th dan belum menikah}} \times 100\%$	Data Sistem Inf. Ditjen Dukcapil Kemendagri Database SIAK
			Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pencatatan sipil			Peningkatan jumlah arsip pencatatan sipil yang dialih media	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dialih media}}{\text{Jumlah dokumen/arsip Akta kelahiran}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kualitas/validitas data dan informasi data dan informasi kependudukan	Penurunan jumlah data kependudukan ganda dan anomali		$\frac{\text{Jumlah data yang divalidasi}}{\text{Jumlah data ganda dan anomali}} \times 100\%$	Data hasil validasi Data Lap. Semesteran dari Ditjen Dukcapil Kemendagri		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Jumlah Instansi Vertikal/horisonal/Lembaga yang memanfaatkan database kependudukan	Instansi Vertikal/Horisonal tersebut meliputi : KPU, Kepolisian, Kantor Pajak, Kementerian Agama, BPJS, KPK, Perbankan	MOU pemanfaatan Data data kependudukan	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan	
		5	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dispendukcapil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	survey IKM berdasarkan Permenpan tentang pedoman Penyusunan IKM	Data hasil survey oleh konsultan	Sekretariat Dinas

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Fungsi
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan pengelolaan potensi dan kekayaan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes	$\frac{\sum \text{RPJMDes} + \text{RKPDDes tahun } n}{660} \times 100\%$	RPJMDes dan RKPDDes	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
		Persentase capaian pengelolaan anggaran desa	$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan anggaran desa}}{\sum \text{anggaran desa}} \times 100\%$	*LRA DESA *APBDes	
		Persentase desa yang memiliki profil desa	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki Profil Desa}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$	Profil Desa	
2	Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Persentase jumlah BUMdes dan BUMAdes yang difasilitasi	$\frac{\sum \text{BUMDes} + \text{BUMAdes yang di fasilitasi}}{\sum \text{BUMDes} + \text{BUMAdes}} \times 100\%$	Data inventaris BUMdes dan BUMAdes	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
		Persentase jumlah pasar desa yang berfungsi dengan baik	$\frac{\sum \text{Pasar desa yang berfungsi dengan baik}}{\sum \text{Pasar desa}} \times 100\%$	Data inventaris pasar desa	
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam membangun desa	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina	$\frac{\sum \text{Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di bina}}{\sum \text{Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100\%$	Data Inventaris kelembagaan masyarakat	Bidang Pembangunan Dan Kelembagaan Desa
4	Menigkatkan pengelolaan sarana dan prasarana desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang berfungsi sesuai SPM	$\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana desa yang berfungsi sesuai SPM}}{\sum \text{Sarana dan prasarana desa}} \times 100\%$	Data inventaris sarana dan prasarana desa	Bidang Pembangunan Dan Kelembagaan Desa
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Persentase desa yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif	$\frac{\text{Jumlah desa yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Data desa yang menerapkan sistem manajemen pembangunan partisipatif	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
		Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan}}{\text{Jumlah program pemberdayaan}} \times 100\%$	Data swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan	

18. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
 - Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Komposit antara proporsi penduduk, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita	Report base IPG oleh BPS	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
		Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Masyarakat dan Pemerintahan Daerah.	$\frac{\text{Jumlah perempuan dalam jabatan organisasi masyarakat dan pemuda}}{\text{Jumlah jabatan pada organisasi masyarakat dan pemuda}} \times 100\%$	Report base data jumlah perempuan yang menduduki jabatan dalam organisasi masyarakat dan pemuda	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
2	Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A);	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih}}{\text{Jumlah Aduan}} \times 100\%$	Report base data penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Meningkatnya penyelenggaraan dan pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat untuk menjaga keberlangsungan Program KKBPK	Prevalensi peserta KB Aktif;	$\frac{\text{Jumlah peserta Kb Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan usia Subur}} \times 100\%$	Report base data peserta KB aktif dari pasangan usia subur	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun;	$\frac{\text{Jumlah PUS yg isterinya dibawah usia 20 thn}}{\text{Jumlah Pasangan usia Subur}} \times 100\%$	Report base data pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi}}{\text{Jumlah PUS di wilayah tersebut}} \times 100\%$	Report base data PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin punya anak lagi dan tidak menggunakan alat	
		Rasio Petugas Lapangan KB /Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah PLKB/PKB}}{\text{Jumlah Desa / Kelurahan}}$	Report base data Jumlah PLKB/PKB per desa	
4.	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Keluarga	Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB	$\frac{\text{Jumlah Anggota BKB yang ber KB}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur anggota BKB}} \times 100\%$	Report base data pasangan usia subur anggota BKB	Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi
		Persentase Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	$\frac{\text{Jumlah Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Jumlah Anggota UPPKS yang PUS}} \times 100\%$	Report base data pasangan usia subur anggota UPPKS	
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 petugas disetiap desa /kelurahan	$\frac{\text{Jumlah PPKBD}}{\text{Jumlah Desa / Kelurahan}}$	Report base data Jumlah PPKBD per desa	
		Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	$\frac{\text{Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga}}{\text{Jumlah Desa/kelurahan}} \times 100\%$	Report base data mikro keluarga per desa	

19. Dinas Perhubungan

- Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang perhubungan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka APILL)	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang	X 100%	Data Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APILL) di Kabupaten Gresik
			Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan		
2	Ketersediaan Jaringan Pelayanan Angkutan	Persentase cakupan Layanan Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Gresik	Ruas Jalan Kabupaten/Kota Terlayani Angkutan Umum	X 100%	Kajian Pengembangan Transportasi Angkutan
			Total Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang membutuhkan Angkutan Umum		
		Persentase Penumpang Angkutan Penyeberangan yang terlayani	Jumlah Kapasitas Angkutan Penyeberangan dalam 1 tahun	X 100%	Data Penumpang Penyeberangan Gresik - Bawean
			Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam 1 tahun		
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan jalan th (n-1) - Th n	X 100%	Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
			Jumlah Kecelakaan Lalu lintas melibatkan angkutan jalan th (n-1)		
4	Ketersediaan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Halte di ruas jalan yang terlayani Angkutan Umum	Jumlah halte di ruas jalan yang dilalui Angkutan	X 100%	Survey/Kajian Pengembangan prasarana Jaringan Trayek Angkutan
			Jumlah Halte yang dibutuhkan		
		Persentase Ketersediaan Terminal di Kabupaten	Jumlah Terminal yang tersedia	X 100%	Data Penumpang Angkutan Jalan
			Jumlah Terminal yang dibutuhkan		

20. Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya keamanan dan pengamanan data elektronik	Persentase Aplikasi yang mendapat pengamanan	Jumlah aplikasi yang mendapat pengamanan (password) X 100%	Website resmi Pemda	Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian
			Jumlah aplikasi		
2	Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi	Persentase database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online	jumlah database pemerintah daerah yang bisa diakses secara online X 100%	Website resmi Pemda	Kepala Bidang Pengembangan E-Governmen
			jumlah database pemerintah daerah		
		Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan	Kecepatan Internet di seluruh SKPD		bandwith internet
			Persentase Aplikasi Sistem Informasi yang aktif	Jumlah Sistem Informasi yang aktif X 100%	Data aplikasi
Persentase Pertumbuhan kunjungan website	Jumlah kunjungan website tahun n - Tahun n-1 X 100%	counter website Pemkab Gresik			
	Jumlah kunjungan website tahun (n)				
3	Meningkatnya pelayanan data statistik	Persentase permintaan data statistik yang ditindaklanjuti	Jumlah permintaan data yang ditindaklanjuti X 100%	Report based permintaan data	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Statistik
			Jumlah permintaan data		
		Persentase data statistik yang valid	Jumlah data statistik yang valid X 100%	Data statistik yang telah diverifikasi BPS	
			Jumlah data statistik		

21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- Fungsi
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatkan Pengelolaan koperasi yang aktif dan pembinaan UKM	Persentase Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif tahun } n}{\text{Jumlah Koperasi tahun } n} \times 100\%$	Database Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi	
		Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah anggota koperasi th } (n-1)} \times 100\%$	Database Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi	
		Persentase pertumbuhan UKM	$\frac{\text{Jumlah UKM th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah UKM th } (n-1)} \times 100\%$	Laporan Lapangan dan perkembangan UKM	Bidang Usaha Mikro	
Persentase Peningkatan omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran	$\frac{\text{Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah omzet penjualan UKM selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran th } (n-1)} \times 100\%$	Laporan Data Pameran	Bidang Usaha Mikro			
2	Mengembangkan kemampuan Industri dan menerapkan teknologi industri untuk penguatan struktur industri serta memperluas jaringan pemasaran produk IKM	Persentase pertumbuhan IKM	$\frac{\text{Jumlah IKM th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah IKM th } n} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelaksanaan	Bidang Perindustrian	
		Persentase IKM yang berlegalitas	$\frac{\text{Jumlah IKM yang berlegalitas th } n}{\text{Jumlah IKM th } (n-1)} \times 100\%$	Laporan Kegiatan pelaksanaan dan data lapangan		Bidang Perindustrian
		Persentase pertumbuhan sentra IKM	$\frac{\text{Jumlah sentra IKM th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah sentra IKM th } (n-1)} \times 100\%$	Laporan kegiatan pelaksanaan		Bidang Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
3	Melakukan pembinaan, penataan usaha perdagangan dan peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta Pengawasan Ekspor Impor	Persentase alat UTTP berterra	$\frac{\text{Jumlah alat UTTP berterra sah tahun } n}{\text{Jumlah seluruh alat UTTP tahun } n-1} \times 100\%$	Laporan pengawasan TERRA	Bidang Perdagangan	
		Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang/komoditi (US \$)	$\frac{\text{Jumlah Nilai ekspor barang/komoditi th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{jumlah Nilai ekspor barang/komoditi th } (n-1)} \times 100\%$	Dokumen ESKA kemendagri yang diajukan oleh pihak eksportir ke Dinas		
		Persentase pertumbuhan nilai impor barang/komoditi (US \$)	$\frac{\text{Jumlah Nilai impor barang/komoditi th } n - \text{ th } (n-1)}{\text{Jumlah Nilai impor barang/komoditi th } (n-1)} \times 100\%$			
		Persentase PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib)	$\frac{\text{Jumlah PKL berkualitas (paham aturan/tata tertib) th } n}{\text{Jumlah seluruh PKL}} \times 100\%$	Laporan survey lapangan		Bidang Perdagangan
		Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	$\frac{\text{Jumlah bedak/kios pasar kabupaten yang direhabilitasi}}{\text{jumlah seluruh bedak/kios pasar kabupaten}} \times 100\%$	Laporan fisik revitalisasi pasar		Bidang Perdagangan
		Persentase penurunan barang beredar ilegal dan tidak layak konsumsi	$\frac{\text{Jumlah barang ilegal dan tidak layak yang diuji tahun } n}{\text{Jumlah barang ilegal dan tidak layak yang diuji tahun } (n-1)} \times 100\%$	Laporan survey lapangan		Bidang Perdagangan

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program urusan Penanaman Modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, dan penandatanganan izin urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi proses pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan Penanaman Modal dan PTSP;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	Realisasi Investasi Permodalan Asing (PMA) dan Permodalan Dalam Negeri (PMDN)	Izin Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal
2	Meningkatnya penyelesaian izin	Persentase penyelesaian izin	$\frac{\text{Jumlah SK terbit}}{\text{Jumlah permohonan masuk}} \times 100\%$	Izin Investasi yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan
3	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur BPMP	Hasil SKM	Hasil SKM sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 berkategori "BAIK"	Hasil SKM sesuai Permenpan Nomor 16 Tahun 2014	Sekretariat

23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

- Fungsi
- Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi urusan Kepemudaan dan olah raga;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kepemudaan dan olah raga;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga Daerah	Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif}}{\text{Jumlah organisasi}} \times 100\%$	report base data organisasi pemuda yang aktif	Bidang Kepemudaan	
		Persentase pemuda yang memiliki keahlian/ketrampilan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang memiliki keahlian/ketrampilan}}{\text{Jumlah pemuda keseluruhan}} \times 100\%$	Report Base data pemuda berprestasi		
		Persentase Cabang olahraga berprestasi	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali}}{\text{Jumlah cabang olahraga yang dimiliki}} \times 100\%$	Report Base data Cabang olahraga berprestasi		Bidang Olahraga

24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.

- Fungsi
- Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan pariwisata dan kebudayaan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Gresik Th. N - (N-1)}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di}} \times 100\%$	Report base Data kunjungan wisata	Bidang Pariwisata
		Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Gresik Th. N - (N-1)}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Gresik}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Pelestarian Benda Cagar Budaya, Museum dan Situs	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah peninggalan / cagar budaya (situs) yang dilestarikan}}{\text{Total peninggalan / cagar budaya (situs) yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	report base Data cagar budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan
		Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Sunan Giri	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Museum pada Th. N - (N-1)}}{\text{Jumlah Pengunjung Museum pada Th. (N-1)}} \times 100\%$		
3	Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	report base data festival seni dan budaya	

25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang arsip.

- Fungsi
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Tahun Berjalan (n) - Jumlah Kunjungan Tahun Lalu (n-1)}}{\text{Jumlah Kunjungan Tahun Lalu (n-1)}} \times 100\%$	Rekap Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
		Persentase anggota perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah anggota perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk dengan range usia antara usia 10 - 59 tahun}} \times 100\%$	Rekap Jumlah anggota	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Hasil Nilai IKM sangat baik	Survey IKM berdasarkan PERMENPAN no : 16 Tahun 2014	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
		Persentase perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang dibina}}{\text{Jumlah perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik}} \times 100\%$	Rekap jumlah perpustakaan sekolah, desa/kelurahan yang sudah dibina	
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Persentase SKPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengelola arsip sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pembinaan kearsipan	Bidang Kearsipan
4	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Kearsipan	Persentase Pengelola Arsip yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Pengelola Arsip yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah Pengelola Arsip}} \times 100\%$	Data pengelola arsip yang bersertifikasi	
			5	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik	

26. Dinas Perikanan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan.

- Fungsi
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan	Produktivitas perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan budidaya (Ton) tahun ke-n	Report base data Statistik Perikanan Tahunan	Bidang Perikanan Budidaya	
		a. Udang Windu (Ton) b. Udang Vannamae (Ton) c. Bandeng (Ton) d. Kerapu (Ton) e. Nila (Ton)				
		Produktivitas lahan tambak air payau dan air tawar	$\frac{\text{Jumlah produksi selama 1 tahun (Ton)}}{\text{Luas lahan tambak (Ha)}} \times 100\%$	Report base data Statistik Perikanan Tahunan		
		a. air payau b. air tawar				
		Produktivitas Garam	Jumlah produksi garam (Ton) tahun ke-n	Report base data Pengembangan Usaha Garam Rakyat		
	Produktivitas Perikanan Tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap (Ton) tahun ke-n	Report base data produktivitas perikanan tangkap	Bidang Perikanan Tangkap		
	a. Penangkapan di laut b. Penangkapan di perairan umum					
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Indeks yang diterima dibandingkan dengan nilai indeks yang dibelanjakan	Report data Badan Pusat Statistik	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Tercapainya kecukupan gizi dan protein hewani masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan	Konsumsi ikan: Konsumsi Hasil Olah Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	Jumlah konsumsi ikan (kg) _____ X 100%	Report base data Statistik Perikanan Tahunan	Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Jumlah Penduduk _____		
3	Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan	Cakupan Infrasutruktur Kelautan dan Perikanan	Jumlah infrastruktur kelautan dan perikanan yang terbangun _____ X 100%	Report base data Pembangunan Infrastruktur perikanan dan kelautan	Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
			Estimasi kebutuhan infrastruktur kelautan dan perikanan _____		
		a. Saluran Tambak	Panjang saluran yang terbangun _____ X 100%		
			Panjang saluran _____		
		b. Tempat Pendaratan Ikan	Jumlah TPI yang terbangun _____ X 100%		
			Jumlah TPI yang ada _____		
c. Tambatan perahu	Jumlah unit tambatan yang terbangun _____ X 100%				
	Jumlah unit tambatan yang ada _____				

27. Dinas Pertanian

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

- Fungsi
- Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanian dan di bidang pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
 - Pengkoordinasian peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
 - Pengkoordinasian tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton)}}{\text{Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton)}} \times 100\%$	Data statistik pertanian	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
			$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton)}}{\text{Jumlah produksi tanaman pertanian (pangan dan hortikultura) unggulan tahun n-1 (ton)}} \times 100\%$		
		Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton)}}{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton)}} \times 100\%$	Data statistik perkebunan	Kepala Bidang Perkebunan
			$\frac{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n (ton) - Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton)}}{\text{Jumlah produksi tanaman perkebunan unggulan tahun n-1 (ton)}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha peternakan	Produktivitas komoditas unggulan peternakan	Jumlah kumulatif produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per tahun	Report base data produksi komoditas unggulan peternakan (ton) per tahun	Kepala Bidang Peternakan
		Produksi Peternakan a. Daging b. Telur c. Susu	Jumlah kumulatif produksi daging, telur, susu (ton) per tahun	Report base data produksi daging, telur, susu (ton) per tahun	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Tercapainya kecukupan gizi dan protein hewani masyarakat dari hasil peternakan	Populasi Peternakan a. Sapi potong b. Sapi perah c. Kambing d. Domba e. Ayam Buras f. Ayam Ras Petelur g. Ayam Ras Pedaging h. Itik j. Entok	Jumlah kumulatif populasi komoditas peternakan (ton) per tahun	Report base data populasi komoditas peternakan (ton) per tahun	Kepala Bidang Peternakan
4	Terkendalinya penyakit hewan menular	Cakupan penanganan penyakit ternak	$\frac{\text{Jumlah penyakit ternak yang ditangani}}{\text{Jumlah penyakit ternak yang teridentifikasi}} \times 100\%$	Report base data penanganan penyakit ternak	
5	Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelembagaannya	Cakupan penyuluh yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Penyuluh}} \times 100\%$	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan
		Persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan dengan kualifikasi baik	$\frac{\text{Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan dengan kualitas baik}}{\text{Jumlah penyuluh yang ikut pelatihan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan	
6	Meningkatnya kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya	Persentase Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang naik kelas}}{\text{Jumlah kelompok tani yang memperoleh penyuluhan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan	
			Jumlah kelompok tani yang memperoleh penyuluhan		
7	Meningkatnya keanekaragaman produk olahan hasil pertanian	Persentase peningkatan produk olahan hasil pertanian	$\frac{\text{Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n (Produk) - Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1 (Produk)}}{\text{Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1 (Produk)}} \times 100\%$	Data produk olahan hasil pertanian	
			Jumlah produk olahan hasil pertanian tahun n-1 (Produk)		
8	Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) dan akses pangan masyarakat (food acces)	Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Gresik	Kepala Bidang Pangan
		Ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Potensi Desa, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemutakhiran Basis Data Terpadu	
		Stabilitas Harga Pangan Utama	$\frac{\text{Harga di tingkat produsen}}{\text{Harga Pembelian Pemerintah}} \times 100\%$	Data harga pangan produsen bulanan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization)	Pola Pangan Harapan	Energi masing-masing komoditas Angka kecukupan gizi	Survey Konsumsi Pangan	Kepala Bidang Pangan
		Keamanan Pangan segar	Jumlah sample yg aman dikonsumsi X 100% Jumlah sample yang diuji	Hasil Uji Laboratorium	
10	Meningkatnya kualitas pengolahan lahan pertanian	Persentase pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin	Jumlah lahan pertanian yang dikelola dengan menggunakan mesin X 100% Jumlah lahan pertanian	Data pengolahan lahan pertanian	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
		Persentase kelompok tani yang diberi bantuan alat pertanian	Jumlah kelompok tani yang diberi bantuan alat pertanian X 100% Jumlah kelompok tani	Data bantuan kelompok tani	

28. Dinas Pertanahan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- Fungsi
- Pelaksanaan perumusan kebijakan dan perencanaan program urusan pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan ; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah tanah Pemda yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah Pemda}} \times 100\%$	Report based data tanah Pemda bersertifikat	Kepala Bidang Administrasi Pertanahan
2	Terwujudnya penyelesaian konflik pertanahan	Persentase tanah yang dibebaskan	$\frac{\text{Jumlah tanah yang dibebaskan}}{\text{Jumlah tanah}} \times 100\%$	Report based data tanah yang dibebaskan	Kepala Bidang Pengadaan Lahan
		Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik pertanahan}} \times 100\%$	Report base data penyelesaian konflik pertanahan	

29. Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina

Tugas Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD.

- Fungsi
- Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait;
 - Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kinerja, efisiensi dan Mutu Pelayanan	Bed Occupancy Rate (BOR)	Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu	Laporan RSUD	Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan
			$\frac{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}}{\text{waktu}} \times 100\%$		
			BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.		
		Average Length of Stay (ALOS)	Jumlah hari perawatan pasien keluar RS	Laporan RSUD	
			Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)		
			ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.		
Turn Over Internal (TOI)	$\frac{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari} - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$	Laporan RSUD			
	TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.				
				Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
		Bed Turn Over (BTO)	Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)	Laporan RSUD		
			Jumlah tempat tidur			
			BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.			
		Gross Date Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati}}{\text{Jumlah Pasien Keluar Hidup +Mati}} \times 100\%$	Laporan RSUD		Bidang Pelayanan Medik / Keperawatan
			Keluar hidup atau mati indikator ini memberikan penilaian tentang kualitas rumah sakit meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian <48 jam pada umumnya adalah kasus-kasus kepegawaian			
		Net Date Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati >48 Jam}}{\text{Jumlah Pasien Keluar Hidup +Mati}} \times 100\%$	Laporan RSUD		
Indikator NDR ini dinilai sensitif karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit, merupakan hasil resultan dari kinerja program kegiatan mutu pelayanan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan yang memadai, kualitas pelayanan penunjang medik, ketersediaan obat dan ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan.						
2	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Promkes	
			IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit			
		Cost Recovery Rate (CRR)	$\frac{\text{Jumlah pendapatan}}{\text{Belanja Operasional}} \times 100\%$	Laporan RSUD	Bagian Keuangan	
			Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit			
		Tingkat Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{Jumlah pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	Laporan RSUD	Bagian Keuangan	
			Menggambarkan tingkat kemampuan dan kemandirian rumah sakit dalam membiayai seluruh belanja rumah sakit (belanja langsung dan belanja tidak langsung, termasuk belanja modal) dari pendapatan fungsional rumah sakit			

30. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga.

- Fungsi
- pengkoordinasian penyusunan perencanaan kebijakan di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan, wawasan kebangsaan dan hubungan antar lembaga;
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	Menurunnya konflik sosial antar umat beragama	Persentase Konflik yang dapat diselesaikan	Jumlah konflik yang diselesaikan	X 100%	Laporan data konflik	Kasi Wasbang
			Jumlah konflik			
2	Meningkatnya partisipasi parpol	Persentase jumlah parpol yang dapat kursi di DPRD	Jumlah parpol yang dapat kursi di DPRD	X 100%	Laporan data parpol	Kasi Hub. Antar Lembaga
			Jumlah parpol yang mengikuti Pemilu			
3	Terkelolanya pusat informasi kewaspadaan dini masyarakat	Persentase terbentuknya FKDM di Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kab. Gresik	Jumlah FKDM tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan	X 100%	Laporan data FKDM	Kasi Kewaspadaan
			Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan			
2	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib, dan aman di masyarakat	Cakupan LSM yang resmi terdaftar	Jumlah LSM yang terdaftar	X 100%	Laporan pelaksanaan demo	Kasi Hub. Antar Lembaga
			Jumlah LSM			

31. Kecamatan

Tugas Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan

- Fungsi
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
 - Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
 - Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
 - Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kecamatan
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran perda di Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan (n)} - \text{Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n-1)}}{\text{Jumlah pelanggaran perda di Kecamatan tahun (n)}} \times 100\%$	Report base data tindak kriminal	Kecamatan
			$\frac{\text{Jumlah konflik yang ditindaklanjuti/difasilitasi}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$	Report base data konflik	Kecamatan
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang hadir dalam Musrenbangcam}}{\text{Jumlah seluruh masyarakat yang diundang pada kegiatan Musrenbangcam}} \times 100\%$	Daftar Hadir Musrenbangcam	Kecamatan
			$\frac{\text{Jumlah program/kegiatan usulan masyarakat (kelurahan/desa) yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah seluruh program/kegiatan yang diusulkan}} \times 100\%$	Report base data program/kegiatan usulan masyarakat	Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat desa/kelurahan	Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina}}{\text{Jumlah organisasi kemasyarakatan}} \times 100\%$	Report base data pembinaan organisasi masyarakat	Kecamatan
5	Meningkatnya pembinaan perekonomian masyarakat	Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	$\frac{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina}}{\text{Jumlah lembaga ekonomi desa}} \times 100\%$	Report base data pembinaan lembaga ekonomi desa	Kecamatan

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si